



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 5, No. 2, 2024

TRANSFORMASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK : TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA DIGITAL

Susan¹, Mohamad Djasuli²

¹Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

²Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

susanlestari38@gmail.com¹, djasuli@trunojoyo.ac.id²

ABSTRACT

Digital transformation includes fundamental changes to business processes, structures and organizational systems with the aim of improving performance with the use of digital technology platforms. This transformation effort does not only occur in the private sector, but also in the public sector, with the aim of changing the way people work and provide services. The aim of the research is to analyze the digital transformation of financial reporting in government, the challenges in implementation and the opportunities offered by digital technology for transparency and accountability in the public sector. This descriptive research uses a qualitative approach. Next, collect data using library research. There are several research results, one of which is that digital accounting transformation plays an important role in the public sector. Apart from being able to make it easier to prepare financial reports in real-time, it can also improve better public services and in implementing digital accounting, comprehensive and ongoing training is needed to ensure that public sector employees have sufficient skills and knowledge to operate digital accounting systems effectively.

Keywords: *Transformation, Digital Accounting, Challenges, Opportunities*

ABSTRAK

Transformasi digital mencakup perubahan mendasar pada proses bisnis, struktur, serta sistem organisasi dengan tujuan meningkatkan kinerja dengan penggunaan platform teknologi digital. Upaya transformasi ini tidak hanya terjadi pada sektor swasta, namun juga di sektor publik, dengan tujuan mengubah cara kerja dan layanan kepada masyarakat. Tujuan pada penelitian adalah untuk menganalisis transformasi digital terhadap laporan keuangan di Pemerintahan, tantangan dalam pengimplementasian dan peluang yang ditawarkan teknologi digital untuk transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Terdapat beberapa hasil penelitian salah satunya transformasi akuntansi digital berperan penting dalam sektor publik. Selain dapat mempermudah pembuatan laporan keuangan secara *real-time* juga dapat meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik dan dalam pengimplementasian akuntansi digital pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan pegawai sektor publik memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengoperasikan sistem akuntansi digital dengan efektif.

Kata Kunci: Transformasi, Akuntansi Digital, Tantangan, Peluang

PENDAHULUAN

Banyak negara telah mengusung inovasi dalam penerapan ICT dan teknologi digital agar dapat beradaptasi dengan cepat dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Pertumbuhan data dan konektivitas yang semakin tinggi telah memicu perkembangan pendekatan baru dan praktik baru dalam penggunaan teknologi digital yang mampu mengubah organisasi secara signifikan. Menurut Wirtz, Weyerer, & Sturm, 2020 Transformasi digital mencakup perubahan mendasar pada proses bisnis, struktur, serta sistem organisasi dengan tujuan meningkatkan kinerja dengan penggunaan platform teknologi digital. Upaya transformasi tidak terjadi hanya pada sektor swasta, namun juga terjadi di sektor publik, dengan tujuan mengubah cara kerja dan layanan kepada masyarakat. Pentingnya transformasi digital di sektor publik dipicu oleh percepatan perkembangan platform digital serta tuntutan yang meningkat dari masyarakat sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi.

Perkembangan cepat digitalisasi keuangan publik di Indonesia, khususnya pada manajemen penerimaan juga pengeluaran pemerintah, kini tidak terjadi hanya pada tingkat nasional, namun juga telah menyebar ke beberapa daerah. Transformasi digital keuangan publik dimotivasi oleh setidaknya tiga alasan utama. Pertama, pemerintah daerah dapat memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi layanan publik, juga membantu meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai perlunya pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang terus bertambah. Evaluasi Kementerian Keuangan pada tahun 2023 menekankan bahwa sebanyak 380 kabupaten/kota, atau lebih dari separuh total jumlah kabupaten/kota di Indonesia, mempunyai kapasitas fiskal yang tergolong rendah atau sangat rendah. Kedua, transformasi layanan publik memaksa transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang diharapkan oleh masyarakat. Ketiga, percepatan perkembangan teknologi digital diiringi dengan peningkatan penggunaan transaksi digital sejak pandemi COVID-19 adalah kesempatan untuk mendorong reformasi layanan publik.

Sebagai wujud akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah, pada tingkat pusat ataupun daerah, transparan dan dapat diandalkan. Setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, laporan keuangan pemerintah diberikan kepada masyarakat umum dan DPR/DPRD. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti prinsip (*good governance*). Ciri-ciri kualitatif dari laporan keuangan pemerintah, sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), termasuk (1) relevansi, (2) keandalan, (3) dapat dibandingkan serta (4) dapat dimengerti. Jika data pada laporan keuangan daerah memenuhi syarat karakteristik kualitatif, ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah berhasil mencapai transparansi juga akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah harus maksimal dalam menerapkan kemajuan teknologi informasi dan menciptakan sistem informasi manajemen yang terintegrasi serta proses kerja yang memfasilitasi kerja pemerintahan secara holistik dengan mempermudah kegiatan antar unit kerja. Wilkinson dkk., (2000) menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi melibatkan (1) pemrosesan data, informasi, manajemen system serta proses kerja secara elektronik (2) penggunaan kemajuan teknologi informasi untuk membuat layanan publik lebih mudah didapat juga terjangkau oleh masyarakat. Berdasarkan pernyataan diatas, Pemerintah Kabupaten Bangkalan mendapatkan prestasi LHP-LKPD selama 6 tahun berturut-turut dari tahun 2017-2022 dengan Opini WTP setelah sebelumnya mendapat Opini WDP dalam waktu 3 tahun berturut-turut pada tahun 2014-2016 (BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, 2020). LKPD 2016 cukup memprihatinkan karena terdapat 14 temuan dan sejumlah saran dari hasil pemeriksaan BPK. Di antaranya, ketidakpatuhan terhadap peraturan 8 temuan dan kelemahan penerapan sistem pengendalian internal 6 temuan (Basri, 2018)

Delapan hasil ketidakpatuhan terhadap peraturan mencakup pembayaran tunjangan jabatan yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 76,2 juta, pembayaran insentif PBB sektor perdagangan dan kehutanan yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 205,22 juta, serta realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah yang tidak didukung sebesar Rp 222,03 juta. Selain itu, realisasi belanja modal untuk jalan irigasi dan jaringan yang tidak sesuai dengan kontrak mencapai Rp 4,4 miliar, mengalami kerusakan senilai Rp 334 juta, dan tidak ada denda keterlambatan yang dipungut sebesar Rp 32,7 juta. Pelaksanaan belanja modal untuk gedung juga bangunan yang tidak sesuai dengan kontrak mencapai Rp 132,9 juta, mengalami kerusakan senilai Rp 54,5 juta, dan belum dipungut denda keterlambatan sebesar Rp 152,3 juta. Sementara

itu, dari enam temuan kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian intern, termasuk penyajian investasi permanen pada tiga BUMD sebesar Rp 86,8 miliar yang tidak didukung oleh laporan keuangan yang dapat dipercaya.

Melihat kasus yang terjadi Kabupaten Bangkalan, dapat disimpulkan pentingnya keterbukaan dan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut uraian latar belakang diatas terdapat beberapa topik penelitian yang akan didiskusikan pada artikel ini adalah analisis transformasi digital terhadap laporan keuangan pada Pemerintahan, tantangan dalam pengimplementasian dan peluang yang ditawarkan teknologi digital untuk transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik. Kajian ini diharapkan dapat membantu dalam membangun strategi untuk transformasi digital organisasi publik.

KAJIAN LITERATUR

1. *Transformasi Digital*

Transformasi digital bukan fenomena baru. Diluncurkan pada akhir tahun 1990-an, lalu kembali disorot pada pertengahan 2000-an. Transformasi digital terdiri dari dua kata; sebelumnya kata "digital" dipakai untuk mengacu pada "TI", yang merupakan singkatan dari teknologi informasi, tetapi sekarang didefinisikan dengan cara yang tidak sama. Sekarang ini, strategi digital untuk organisasi sebagian besar berfokus dalam roadmap juga tujuan, dimulai dari proses sampai produk serta layanan. Langkah-langkah menuju ke transformasi digital bisa dilihat dalam Gambar



Gambar 1: Langkah-langkah menuju transformasi digital. Sumber: (Verhoef, et al., 2021)

1) *Digitisasi*

Verhoef, et al., 2021 mengatakan Digitisasi merupakan cara merubah informasi analog menjadi digital. Sedangkan Bloomberg (2018) mengatakan digitisasi adalah cara mengubah tugas atau proses yang semula dilakukan secara analog atau dengan menggunakan kertas konvensional ke dalam bentuk digital, hingga komputer bisa membantu untuk mengakses, memindahkan serta menyimpan data. Dari kedua sumber tersebut, bisa disimpulkan digitisasi merupakan proses merubah informasi, tugas, atau proses dari bentuk non-digital seperti analog atau kertas juga bentuk lainnya ke format digital.

2) *Digitalisasi*

Andersson, et al. (2022), mengungkapkan bahwa transformasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepentingan pribadi, nilai etika, diskusi, serta kumpulan data algoritma. Ini mengacu terhadap bagaimana teknologi informasi maupun digital merubah operasi bisnis yang telah ada. Kemungkinan besar digitalisasi dilakukan setelah tahap digitisasi diselesaikan.

3) *Transformasi digital*

Transformasi digital adalah integrasi digital secara menyeluruh membuka peluang bagi inovasi dan kreativitas terbaru dalam bidang spesifik, tidak hanya sekadar meningkatkan serta memberikan dukungan pada metode tradisional (Vezyridis, 2011). Transformasi digital adalah tahap perubahan yang mencakup penerapan teknologi digital atau model bisnis digital baru yang meningkatkan nilai perusahaan (Verhoef, et al., 2021), menambahkan pengalaman konsumen, prosedur operasional, serta model bisnis untuk menciptakan nilai konsumen (Morakanyane et al., 2017).

2. *Akuntansi Sektor Publik*

Mardiasmo menyatakan bahwa akuntansi sektor publik yaitu instrumen data yang memberi manfaat bagi masyarakat dan pemerintah sebagai cara untuk menggunakan sumber daya secara efisien guna mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, Meliala menyatakan bahwa akuntansi sektor publik mencakup proses dari pengumpulan, pencatatan, klasifikasi, analisis, hingga pelaporan transaksi keuangan organisasi publik, dengan tujuan menciptakan informasi keuangan untuk para pengguna laporan keuangan yang nantinya bisa digunakan dalam mengambil keputusan.

Menurut Bastian, akuntansi sektor publik merujuk pada praktik akuntansi yang mengelola dana dari masyarakat, yang melibatkan analisis serta strategi akuntansi tertentu. Menurut pandangannya, cakupan organisasi sektor publik dapat ditetapkan berdasarkan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, karena dana yang dipakai diperoleh dari mereka. Beberapa area yang termasuk dalam cakupan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia adalah Akuntansi Pemerintah Pusat, Akuntansi Pemerintah Daerah, Akuntansi Partai Politik serta LSM dll.

3. Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (2016) menyatakan laporan keuangan yaitu bagian dalam pelaporan keuangan yang menggambarkan data keuangan perusahaan, biasanya termasuk neraca, laporan laba rugi, dan perubahan keadaan keuangan, dan laporan dan catatan lainnya juga memberikan penjelasan tentang isi laporan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi penting bagi para pengambil keputusan dagang dan perbankan. Laporan keuangan, menurut Septarini & Papilaya (2016) adalah sumber informasi keuangan yang signifikan diperlukan oleh beragam pihak dengan kepentingan yang berbeda untuk memfasilitasi pengambilan keputusan strategis.

Maka dari itu, isi dari laporan keuangan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah, sesuai pada ciri-ciri yang telah ditetapkan. Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi terkait kondisi keuangan, kinerja keuangan juga arus kas pada entitas yang bermanfaat untuk mayoritas pemakai laporan keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi dan untuk menampilkan tanggung jawab manajemen pada pengelolaan sumber daya yang mereka tangani (Wahyuni & Budiwitjaksono, 2017). Menurut Enyi (2019), laporan keuangan memperlihatkan keadaan keuangan perusahaan melalui 3 aspek:

- 1) Dengan menggunakan neraca yang mencatat aset, kewajiban, serta ekuitas pemilik perusahaan.
- 2) Dengan menggunakan laporan laba rugi yang menguraikan pendapatan juga kerugian perusahaan.
- 3) Dengan menggunakan laporan arus kas yang memperlihatkan detail tentang arus masuk dan keluar kas perusahaan.

4. Dampak Teknologi Informasi pada Kegiatan Akuntansi

Proses transaksi bisnis pasti akan berubah karena kemajuan teknologi informasi saat ini. Menurut Elisabeth (2019), dunia akuntansi dapat sangat berubah karena pertumbuhan teknologi informasi yang cepat. Saat ini, ada perubahan dalam teknologi informasi yang memungkinkan sistem untuk melakukan transaksi secara manual dengan bantuan kalkulator. Astuti (2006) mengatakan bahwa penggunaan sistem akuntansi berbasis komputer serta sistem pemrosesan yang canggih, dan pemrosesan transaksi yang lebih cepat, pekerjaan seperti menulis, sangat memakan waktu jika dikerjakan secara manual, telah berubah.

Kassandra dan Juliarsa (2016) mengatakan, sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sekelompok informasi yang berkaitan dengan bisnis yang dikumpulkan dan diproses selama proses yang berkaitan dengan bisnis. dianggap penting untuk mencapai kinerja yang lebih baik, pada hal pengambilan keputusan. Kualitas sistem informasi akuntansi yaitu gambaran dari sebuah sistem yang memiliki fitur yang diharapkan dari sistem itu sendiri. Sifat-sifat berikut menunjukkan tingkat keunggulan sistem informasi akuntansi: kemudahan penggunaan, akses yang cepat, kehandalan, fleksibilitas, dan perlindungan data yang aman. Dengan adanya karakteristik-karakteristik tersebut dalam kualitas sistem informasi, pengguna akan merasa puas dengan penggunaannya.

Sistem Informasi Akuntansi memiliki dampak positif yang signifikan pada aktivitas bisnis, terutama pada proses pencatatan, penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan keputusan. Contoh manfaat positif dari keberadaan SIA adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaporan, serta peningkatan transparansi. Temuan ini juga didukung oleh hasil penelitian sebelumnya oleh Ratnaningsih & Suaryana (2014), yang menunjukkan perusahaan mempunyai

tingkat teknologi informasi yang tinggi, partisipasi aktif dari manajemen, dan pengetahuan luas dari manajer cenderung memiliki sistem informasi akuntansi yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Creswell (2014) mengatakan penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan menggali secara mendalam topik penelitian sehingga dapat diperoleh pemahaman yang rinci dan menyeluruh. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi yang dapat dipakai untuk menjelaskan variabel, gejala, maupun kondisi yang menjadi topik penelitian.

Data penelitian yang dipakai adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Proses ini melibatkan pengumpulan teori, data penelitian, maupun temuan dari penelitian sebelumnya dari bermacam sumber yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Data yang terkumpul lalu dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang terdapat tiga langkah analisis, sesuai dengan pendekatan yang dijelaskan oleh Bungin (2017):

1. Reduksi data

Peneliti memeriksa data untuk memilih informasi yang berkaitan sambil mengabaikan data yang tidak berkaitan pada penelitian ini.

2. Penyajian Data

Setelah informasi yang diperoleh disederhanakan, maka data dikemas dalam bentuk uraian dan grafik, keterkaitan kategori, flowchart, dan sejenisnya untuk membuat analisis lebih mudah serta interpretasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Inti dari penelitian kualitatif adalah hasil analisis data yang digunakan untuk menentukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Analisis tersebut bersifat induktif, di mana peneliti mengutamakan penggunaan pemikiran juga pemahaman pribadi yang didasarkan dalam teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan era digital membawa konsep baru pada bidang akuntansi, dimana kemajuan teknologi juga berbagai produknya dianggap mampu menggantikan peran krusial akuntan pada menjalankan sejumlah aktivitas penting dalam perusahaan. Untuk alasan meningkatkan efisiensi dan efektivitas, aplikasi dan perangkat lunak komputer sekarang digunakan untuk pencatatan dan analisis data keuangan daripada bergantung pada ketelitian dan kecermatan akuntan. Meskipun secara positif teknologi membantu mengurangi beban kerja akuntan, namun hal ini juga mengarah pada fokus akuntan untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang belum bisa digantikan oleh teknologi komputer.

Transformasi Digital di Sektor Pemerintahan

Menurut penelitian Mergel, et al. (2019), untuk memenuhi ekspektasi masyarakat pada kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan digital real-time yang bernilai tinggi, pemerintah telah merubah standar operasional mereka. Ini dilakukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas layanan publik, dengan fokus utama pada transparansi serta kepuasan warga. Transformasi digital dalam sektor publik dianggap sebagai pendekatan organisasi yang holistik, tidak sekadar menghadirkan formulir online atau melakukan transisi dari metode analog ke digital pada layanan publik. Proses transformasi digital dipengaruhi oleh faktor internal juga eksternal, membutuhkan penyesuaian yang berkelanjutan dari proses, layanan, hingga produk untuk memenuhi kebutuhan eksternal.

Transformasi Digital Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Otomasi proses bisnis serta integrasi sistem adalah beberapa contoh transformasi digital yang dapat meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Perusahaan bisa mempercepat proses

pelaporan keuangan, mengurangi potensi kesalahan manusia, serta meningkatkan ketepatan informasi yang tercantum pada laporan keuangan dengan mengotomatiskan pengumpulan serta pengolahan data keuangan. Pada transformasi digital, penggunaan teknologi analitik dan kecerdasan buatan bisa mendukung analisis data keuangan dengan lebih teliti dan efisien.

Ini bisa meningkatkan ketepatan laporan keuangan serta memfasilitasi penyampaian informasi dengan cepat, memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengakses data finansial yang relevan dengan lebih cepat. Dengan transformasi digital, pengelolaan data juga meningkat baik dari segi kualitas maupun keamanannya. Tingkat keamanan yang tinggi juga usaha untuk mengurangi kesalahan data bisa meningkatkan kualitas data yang digunakan untuk pembuatan laporan keuangan. Hal ini secara langsung mengurangi risiko terjadinya kesalahan serta tindakan curang.

Transparansi dan Akuntabilitas

Pengaruh Akuntansi Digital terhadap Transparansi dan Akuntabilitas: Penggunaan akuntansi digital memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Setiap transaksi dapat dipantau dengan lebih mudah berkat pencatatan otomatis dan real-time. Hal ini menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah bisa berbeda tergantung dalam banyak hal, seperti fitur teknologi, organisasi, serta lingkungan. Sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa akuntansi digital bisa memperbaiki transparansi juga akuntabilitas, contohnya dengan mempermudah akses, penyampaian serta verifikasi data keuangan. Di sisi lain, beberapa penelitian megeungkapkan bahwa akuntansi digital juga bisa mengurangi transparansi serta akuntabilitas, contohnya meningkatkan risiko keamanan, kesalahan serta manipulasi data keuangan.

Peluang akuntansi digital

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dengan adanya Akuntansi sektor publik di era digital, seperti berikut ini :

1) Efisiensi Operasional

Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dalam pelayanan publik, termasuk proses akuntansi seperti pengelolaan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan.

2) Analisis Data yang Lebih Baik

Dengan teknologi, sektor publik dapat menganalisis data keuangan dan non-keuangan dengan lebih baik. Hal ini bisa mendukung dalam membuat keputusan yang lebih baik seta perencanaan kebijakan yang lebih efektif.

3) Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Transformasi digital dapat membantu meningkatkan pelayanan publik dengan membuka kemungkinan akses yang lebih mudah serta cepat ke layanan serta meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

4) Inovasi dalam Pengelolaan Keuangan

Teknologi baru seperti blockchain dapat membawa inovasi dalam pengelolaan keuangan sektor publik, termasuk pembayaran, manajemen aset, dan pelacakan pengeluaran.

5) Proses Audit

Kecerdasan buatan (AI) semakin populer di kalangan akuntan dan pelaku bisnis untuk mengotomatiskan proses audit dan memeriksa kepatuhan pelaporan keuangan terhadap pajak internasional. Peluang seperti peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan, peningkatan kepatuhan dan pengambilan keputusan, dan otomatisasi tugas rutin dapat dicapai melalui penggunaan kecerdasan buatan. Tidak mudah untuk memilih antara menggunakan penilaian profesional atau kecerdasan buatan.

Tantangan Implementasi Akuntansi Digital

Implementasi pada akuntansi digital di akuntansi sektor publik menghadapi tantangan khusus yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa tantangan utama:

1) Kurangnya Keterampilan dan Pengetahuan Teknologi

Banyak pegawai di sektor publik mungkin tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup dalam penggunaan teknologi. Pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa pegawai memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem akuntansi digital dengan efektif.

2) Kesulitan Integrasi Sistem

Seiring dengan adopsi teknologi baru, entitas sektor publik mungkin menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan sistem akuntansi digital dengan sistem lain yang sudah ada. Ini dapat menciptakan ketidakcocokan data dan kesulitan dalam pertukaran informasi antara departemen yang berbeda.

3) Kebutuhan Aksesibilitas dan Inklusivitas

Sebagai penyedia layanan publik, entitas sektor publik harus memastikan bahwa layanan mereka tetap bisa diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang mungkin memiliki keterbatasan fisik atau akses terbatas terhadap teknologi. Membangun solusi akuntansi digital yang bisa diakses juga digunakan oleh semua orang merupakan tantangan tersendiri.

4) Keamanan Data

Sebagai penyimpan data sensitif, entitas sektor publik harus memprioritaskan keamanan data. Ancaman keamanan cyber dapat berpotensi mengancam integritas dan kerahasiaan data keuangan publik. Investasi dalam sistem keamanan yang kuat dan kebijakan yang ketat diperlukan untuk melindungi data tersebut.

5) Kompleksitas Regulasi

Sebagai entitas yang diatur oleh banyak peraturan dan pedoman, sektor publik sering kali harus berurusan dengan kompleksitas regulasi yang mengatur akuntansi dan pelaporan keuangan. Memastikan bahwa sistem akuntansi digital mematuhi semua persyaratan regulasi adalah tantangan tersendiri.

6) Beberapa masalah yang muncul termasuk kebutuhan CFO dan fungsi keuangan untuk menjaga data, dan kehilangan privasi karena banyak perangkat elektronik mengumpulkan dan mengirimkan data tanpa pengetahuan pengguna.

KESIMPULAN

Dari temuan penelitian tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, penggunaan teknologi analitik serta kecerdasan buatan dalam proses transformasi digital bisa memfasilitasi analisis data keuangan dengan lebih menyeluruh juga efisien. Kedua, transformasi akuntansi digital berperan penting dalam sektor publik. Selain dapat mempermudah pembuatan laporan keuangan secara *real-time* juga dapat meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Ketiga, dalam pengimplementasian akuntansi digital pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan pegawai sektor publik memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengoperasikan sistem akuntansi digital dengan efektif. Keempat, sebuah kesalahan kecil pada input data dapat menyebabkan semua informasi yang didapat oleh aplikasi. Kesalahan ini bisa disebabkan oleh kelalaian, kurangnya keahlian saat menggunakan teknologi, atau bahkan disengaja (kecurangan).

DAFTAR LITERATUR

- Almira Murfidyah, Nurlaily, A., & Arista Amanda Putri. (2021). Penerapan Audit Berbasis IT Di Era Digital: Peluang Atau Tantangan? *Prosiding National Seminar On Accounting, Finance, And Economics (NSAFE)*, 1(1). <http://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/722>
- Fitari, T., & Lasmi Hartati. (2022). Analisis Penerapan Digitalisasi Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil (Studi Pada Usaha Kecil Kuliner Di Kota Pangkalpinang). *Equity/Equity*, 10(1), 72–84. <https://doi.org/10.33019/equity.v10i1.93>
- Fony Pangandaheng, Joubert Baren Maramis, Paul, D., Herman, O., & Djurwati Soepeno. (2022). Transformasi Digital: Sebuah Tinjauan Literatur Pada Sektor Bisnis Dan Pemerintah. *Deleted Journal*, 10(2). <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41388>
- Gerry Hamdani Putra, & Sophan Sophian. (2024). Akuntansi Berbasis Digital Di Pemerintahan Dan Pemanfaatannya Untuk Perkembangan Umkm. *JKBP : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). Retrieved From <https://ojs.akbpstie.ac.id/index.php/jkbp/article/view/520>
- Irfan Ikhwanul Haza. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1). <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1604>
- Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, & Putu Eka Purnamaningsih. (2022). Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Masa Era New Normal Pada Pemerintah Daerah Badung. *Media Bina Ilmiah*, 16(10), 7507–7518. <https://doi.org/10.33578/mbi.v16i10.1>
- Khoirul Rahmansyah, Amin, M., & Sari. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Dan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Digital Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(08). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/11330>
- Kristiyani, D., & Hamidah, H. (2020). Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah Fraud Pada Sektor Publik Di Era Digital. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 22(2), 289-304.